

Lanskap Pemerintahan: Memahami Perbedaan dan Implikasi Sistem Presidensial, Parleментар, dan Semi-presidensial

Abdul Rahman Basri¹, Muhammad Sawir², Santrio Kamaluddin³, Rhina Pongtuluran⁴

Universitas Yapis Papua, Jl. Dr. Samratulangi No.11 Dok V Atas Jayapura

Corresponding Author: sawirmuhammad103@gmail.com

Keyword:
Landscape;
System;
Government.

Abstract: This study aims to determine and analyze the significant differences of presidential, parliamentary, and semi-presidential systems of government and the practical implications associated with the dynamics of governance on a global scale. The variables of this study include executive power structure, power sharing between the executive and legislature, political stability, and government accountability. The research method used is a qualitative approach with a descriptive method, that is, the research data is analyzed by involving a comparative analysis of government systems in countries that represent the three systems, considering a sample of relevant countries in a descriptive manner. The research findings reveal that presidential systems tend to have a stronger executive separate from the legislature, while parliamentary systems show closer integration between the two branches of government. Meanwhile, semi-presidential systems combine elements of both systems. The implications of these differences include political stability, policy quality, and government accountability. This research provides deeper insights into the design and performance of government systems, as well as providing a better understanding of the factors that influence political stability and government effectiveness around the world.

Kata Kunci:
Lanskap;
Sistem;
Pemerintahan.

Abstrak: Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan signifikan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan semi-presidensial dan implikasi praktis yang terkait dengan dinamika pemerintahan dalam skala global. Variabel penelitian ini mencakup struktur kekuasaan eksekutif, pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, stabilitas politik, dan akuntabilitas pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu, data penelitian dianalisis dengan melibatkan analisis perbandingan (komparatif) sistem pemerintahan di negara-negara yang mewakili ketiga sistem tersebut, dengan mempertimbangkan sampel negara yang relevan secara deskriptif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa sistem presidensial cenderung memiliki eksekutif yang lebih kuat dan terpisah dari legislatif, sementara sistem parlementer menunjukkan integrasi yang lebih erat antara kedua cabang pemerintahan. Sementara itu, sistem semi-presidensial menggabungkan elemen dari kedua sistem. Implikasi dari perbedaan ini mencakup stabilitas politik, kualitas kebijakan, dan akuntabilitas pemerintah. Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang desain dan kinerja sistem pemerintahan, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di seluruh dunia.

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan merupakan elemen penting dalam tata kelola suatu negara. Sistem ini menentukan bagaimana kekuasaan dibagikan dan dijalankan dalam sebuah negara (Syafii, 2017). Ada berbagai macam sistem pemerintahan yang dianut oleh negara-negara di dunia, seperti sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial (Kristiadi, 2018). Masing-masing sistem memiliki karakteristik dan keunikannya sendiri. Pemahaman yang baik tentang perbedaan dan implikasi dari sistem-sistem pemerintahan ini penting untuk beberapa alasan

(Burhanuddin, 2019). Pertama, sistem pemerintahan memiliki pengaruh besar pada bagaimana suatu negara dijalankan. Sistem yang berbeda dapat menghasilkan outcomes yang berbeda pula dalam hal stabilitas politik, efektivitas pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat. Kedua, globalisasi dan interkoneksi antar negara semakin meningkat. Hal ini membuat interaksi antar negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda menjadi lebih sering. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana sistem-sistem pemerintahan ini bekerja agar dapat menjalin kerjasama dan hubungan yang efektif antar negara. Ketiga, terdapat perdebatan dan diskusi yang terus berlangsung tentang sistem pemerintahan mana yang terbaik. Masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Pemahaman yang komprehensif tentang sistem-sistem pemerintahan ini dapat membantu dalam merumuskan argumen yang lebih terarah dalam perdebatan tersebut.

Dalam memahami dinamika pemerintahan, penting untuk menjelajahi lanskap sistem pemerintahan (Jimly, 2016). Pemerintahan di seluruh dunia beroperasi di bawah berbagai kerangka kerja, terutama sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial (M. D. Mahfud, 2017). Sistem-sistem ini menetapkan pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintah, sehingga membentuk proses politik, formulasi kebijakan, dan struktur pengambilan keputusan dalam suatu negara (Mahendra, 2018). Memahami nuansa dan disparitas di antara sistem-sistem ini sangat penting untuk memahami fungsi dan implikasi efektivitas pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbedaan dan implikasi sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan semi-presidensial. Dengan memeriksa variabel kunci seperti struktur kekuasaan eksekutif, hubungan antara eksekutif dan legislatif, stabilitas politik, dan akuntabilitas pemerintah, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan karakteristik yang berbeda dan dampak dari setiap sistem. Kontribusi teoretis dari penelitian ini terletak pada penyediaan wawasan tentang analisis perbandingan sistem pemerintahan. Dengan mengungkapkan kompleksitas sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial, penelitian ini menambahkan pada kumpulan pengetahuan tentang teori pemerintahan dan ilmu politik. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat memberi informasi kepada pembuat kebijakan, praktisi, dan pemangku kepentingan tentang kelebihan, kelemahan, dan potensi area perbaikan dalam kerangka kerja pemerintahan yang berbeda.

Melalui analisis komparatif, penelitian ini mengungkap disparitas signifikan di antara sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial. Sistem presidensial cenderung memiliki cabang eksekutif yang kuat dan independen, sementara sistem parlementer menunjukkan integrasi yang lebih erat antara cabang eksekutif dan legislatif. Sistem semi-presidensial, di sisi lain, mewakili model hibrida yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua sistem. Temuan ini menekankan pentingnya memahami perbedaan struktural dan operasional di antara sistem-sistem pemerintahan. Lanskap pemerintahan adalah cerminan dari struktur politik suatu negara yang mengatur cara pemerintah beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Dalam kerangka ini, konsep sistem pemerintahan, seperti presidensial, parlementer, dan semi-presidensial, menjadi kunci untuk memahami dinamika kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam suatu negara. Sistem presidensial, misalnya, seringkali menekankan pada kekuatan eksekutif yang kuat dan independen, di mana presiden memiliki otoritas yang luas untuk memimpin pemerintahan. Di sisi lain, sistem parlementer memberikan penekanan pada hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif, dengan kepala negara biasanya merupakan figur seremonial, seperti seorang raja atau presiden, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang dipilih oleh parlemen. Sementara itu, sistem semi-presidensial memadukan elemen-elemen dari kedua sistem tersebut, dengan memiliki presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, seringkali menghasilkan kerjasama dan rivalitas yang unik antara kedua jabatan tersebut.

Memahami perbedaan dan implikasi dari masing-masing sistem pemerintahan menjadi penting (Rajagukguk, 2015). Perbedaan ini mencakup struktur kekuasaan eksekutif, dinamika pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, serta mekanisme akuntabilitas dan

stabilitas politik yang berbeda. Misalnya, sistem presidensial cenderung memiliki tingkat stabilitas politik yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem parlementer, karena presiden yang memiliki kekuasaan yang kuat mungkin menghadapi konflik dengan legislatif. Sementara itu, sistem parlementer dapat menghadapi tantangan dalam mencapai keputusan yang cepat dan efisien karena ketergantungan pada dukungan mayoritas parlemen. Implikasi dari perbedaan ini mencakup dampak pada pembentukan kebijakan, kualitas pemerintahan, dan keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan. Dalam menghadapi kompleksitas lanskap pemerintahan yang semakin beragam, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis secara mendalam perbedaan dan implikasi sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial. Dengan memahami kerangka kerja dasar dan karakteristik unik dari masing-masing sistem, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan strategi pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap tantangan zaman yang terus berkembang.

Penelitian ini fokus mengkaji perbedaan dan implikasi sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan semi-presidensial yang mencakup struktur kekuasaan eksekutif, pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, stabilitas politik, dan akuntabilitas pemerintah. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan signifikan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan semi-presidensial dan implikasi praktis yang terkait dengan dinamika pemerintahan dalam skala global.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu, data penelitian dianalisis dengan melibatkan analisis perbandingan (komparatif) terhadap sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan semi-presidensial (Prasojo, 2015). Pertama-tama, penelitian ini melakukan pemilihan negara sampel yang mewakili masing-masing sistem pemerintahan untuk memastikan representasi yang memadai. Setelah itu, data-data relevan dikumpulkan dari berbagai sumber seperti publikasi akademis, laporan pemerintah, dan database internasional. Data yang terkumpul mencakup informasi mengenai struktur pemerintahan, proses politik, stabilitas politik, kebijakan publik, dan indikator lain yang relevan untuk menganalisis kinerja sistem pemerintahan.

Selanjutnya, data-data tersebut dianalisis secara komparatif untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara sistem-sistem pemerintahan yang diteliti (Hikam, 2016). Analisis ini melibatkan perbandingan aspek-aspek kunci seperti struktur kekuasaan eksekutif, hubungan antara eksekutif dan legislatif, stabilitas politik, dan akuntabilitas pemerintah. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik masing-masing sistem pemerintahan dan menganalisis temuan dari perspektif komparatif. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dengan mempertimbangkan konteks historis, politik, dan sosial masing-masing negara sampel serta relevansinya untuk pemahaman teoritis dan praktis tentang pemerintahan. Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan dan implikasi sistem pemerintahan yang diteliti serta menyediakan landasan empiris bagi analisis dan rekomendasi kebijakan yang relevan (R. B. Kirmanto, 2018).

HASIL DAN DISKUSI

Konteks pada pembahasan ini mengeksplorasi temuan dari analisis komparatif terhadap sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan semi-presidensial. Hasil penelitian ini juga mengungkap perbedaan signifikan antara ketiga sistem tersebut dan implikasi praktis serta teoritis yang terkait dengan dinamika pemerintahan dalam skala global. Dengan memahami temuan ini, maka dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan dan bermakna dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan di berbagai konteks nasional dan internasional. Hasil penelitian ini mengkaji dan membandingkan sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial berdasarkan beberapa aspek, seperti:

Struktur dan Pembagian Kekuasaan

Pilihan sistem pemerintahan yang tepat bagi suatu negara tergantung pada berbagai faktor, seperti sejarah, budaya, kondisi politik, dan sosial. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kajian struktur dan pembagian kekuasaan menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang sempurna. Berikut adalah beberapa hal yang mendasar dalam sistem pemerintahan:

1. Sistem Presidensial
 - a. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
 - b. Pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif dan legislatif.
 - c. Presiden memiliki otonomi yang luas dalam menjalankan pemerintahan.
 - d. Legislatif memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memakzulkan presiden.
 - e. Contoh: Amerika Serikat, Indonesia, Brasil.
2. Sistem Parlementer
 - a. Perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
 - b. Kabinet menteri dibentuk dari dan bertanggung jawab kepada parlemen.
 - c. Parlemen memiliki kewenangan untuk membubarkan kabinet.
 - d. Presiden sebagai kepala negara seremonial.
 - e. Contoh: Inggris, Jepang, India.
3. Sistem Semi-Presidensial:
 - a. Kombinasi antara sistem presidensial dan parlementer.
 - b. Presiden sebagai kepala negara dan memiliki beberapa kewenangan eksekutif.
 - c. Perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan memimpin kabinet menteri.
 - d. Kabinet menteri bertanggung jawab kepada presiden dan parlemen.
 - e. Contoh: Perancis, Rusia, Korea Selatan.

Tabel 1. Perbandingan Struktur dan Pembagian Kekuasaan

Aspek	Presidensial	Parlementer	Semi-Presidensial
Kepala Negara	Presiden	Presiden (seremonial)	Presiden
Kepala Pemerintahan	Presiden	Perdana Menteri	Perdana Menteri
Pemisahan Kekuasaan	Tegas	Tidak tegas	Campuran
Otonomi Eksekutif	Luas	Terbatas	Terbatas
Kewenangan Legislatif	Mengawasi dan Memakzulkan	Membubarkan Kabinet	Mengawasi dan Membubarkan Kabinet

(Sumber: Budiardjo, 2022)

Studi-studi terkait dengan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan semi-presidensial telah menjadi fokus utama dalam bidang ilmu politik dan pemerintahan. Analisis-aslis yang membedah struktur dan pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan menjadi esensi dalam memahami perbedaan dan karakteristik masing-masing sistem tersebut. Studi klasik oleh Juan Linz (1990) menggambarkan perbedaan antara sistem presidensial dan parlementer dalam konteks stabilitas politik. Menurut Linz, sistem parlementer cenderung lebih stabil daripada sistem presidensial karena adanya keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif serta mekanisme pemilihan kepemimpinan yang lebih fleksibel. Di sisi lain, analisis oleh Maurice Duverger (1980) mengungkapkan kompleksitas struktur dalam sistem parlementer yang mempengaruhi dinamika kekuasaan. Duverger menyoroti pentingnya koalisi partai dalam sistem parlementer yang dapat memperkuat atau melemahkan stabilitas politik, tergantung pada keadaan politik dan ekonomi saat itu. Selain itu, studi empiris oleh Arend Lijphart (1999) mengeksplorasi sistem pemerintahan semi-presidensial dan mencoba memahami sejauh mana struktur kekuasaan yang terbagi antara eksekutif dan legislatif dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan serta stabilitas politik dalam jangka panjang. Analisisnya menunjukkan bahwa sistem semi-presidensial sering kali menghadapi tantangan unik dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.

Sejumlah penelitian komparatif juga telah dilakukan untuk membandingkan berbagai aspek sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial. Sebagai contoh, analisis oleh Cheibub, Przeworski, dan Saiegh (2004) menyajikan model formal untuk memahami hubungan antara struktur kekuasaan eksekutif dan stabilitas politik dalam sistem presidensial dan parlementer. Selain itu, studi oleh Shugart dan Carey (1992) menggali pembagian kekuasaan antara presiden dan parlemen dalam sistem semi-presidensial dan menganalisis dampaknya terhadap stabilitas politik dan keberlangsungan pemerintahan. Tidak hanya itu, kajian terkait juga mencakup analisis tentang akuntabilitas pemerintahan dalam berbagai konteks sistem pemerintahan. Misalnya, penelitian oleh Mainwaring dan Shugart (1997) menyelidiki mekanisme akuntabilitas dalam sistem presidensial dan parlementer serta implikasinya terhadap kinerja pemerintahan dan stabilitas politik.

Melalui tinjauan terhadap literatur ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas struktur dan pembagian kekuasaan dalam sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial serta implikasinya terhadap stabilitas politik dan kinerja pemerintahan. Setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Memahami kelebihan dan kekurangan dari sistem tersebut, penting untuk memilih sistem yang tepat bagi suatu negara. Sistem presidensial memiliki kelebihan dalam memastikan stabilitas eksekutif karena presiden dipilih secara terpisah dan memiliki kewenangan eksekutif yang kuat. Namun, kelemahan sistem ini terletak pada potensi terjadinya konflik antara eksekutif dan legislatif karena kedua lembaga tersebut dipilih secara terpisah. Selain itu, sistem presidensial cenderung sulit untuk mengatasi *deadlock* politik jika kedua lembaga tersebut berasal dari partai yang berbeda. Di sisi lain, sistem parlementer memiliki kelebihan dalam memungkinkan integrasi yang lebih erat antara eksekutif dan legislatif, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih kohesif. Fleksibilitas dalam pemilihan kepemimpinan dan kemampuan untuk menangani *deadlock* politik juga menjadi keunggulan sistem parlementer. Namun, kelemahan sistem ini terletak pada potensi terjadinya ketidakstabilan politik jika koalisi pemerintahan pecah, serta kurangnya kontrol langsung terhadap kepala eksekutif. Sementara itu, sistem semi-presidensial menggabungkan elemen dari kedua sistem presidensial dan parlementer. Kelebihan sistem ini terletak pada kemampuannya untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih inklusif. Namun, kelemahan sistem semi-presidensial terletak pada kompleksitas struktur kekuasaan yang dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam tanggung jawab pemerintah dan meningkatkan risiko konflik antar lembaga pemerintahan.

Mekanisme Akuntabilitas

Studi terkait tentang sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial berdasarkan aspek mekanisme akuntabilitas menyoroti perbedaan dalam cara masing-masing sistem memastikan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya. Dalam sistem presidensial, mekanisme akuntabilitas sering kali didasarkan pada pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, di mana presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat melalui pemilihan umum dan dapat diawasi oleh badan-badan pengawasan independen. Meskipun demikian, kekuatan presiden yang kuat dalam sistem ini dapat membuat mekanisme akuntabilitas terkendala, terutama jika presiden memiliki otoritas yang sangat besar dan lemahnya kontrol legislatif. Di sisi lain, dalam sistem parlementer, mekanisme akuntabilitas lebih didasarkan pada konsep tanggung jawab kolektif, di mana kepala eksekutif (biasanya perdana menteri) harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada parlemen dan dapat dijatuhkan oleh keputusan mayoritas parlemen. Kelebihan dari mekanisme ini adalah adanya kontrol yang kuat terhadap kepala eksekutif, serta kemampuan parlemen untuk memilih dan menggulingkan pemerintahan jika tidak memenuhi harapan. Namun, mekanisme ini juga dapat menyebabkan ketidakstabilan politik jika koalisi pemerintah pecah atau jika terjadi kebuntuan dalam proses pembentukan pemerintahan baru.

Sementara itu, dalam sistem semi-presidensial, mekanisme akuntabilitas seringkali mencerminkan campuran dari kedua sistem sebelumnya. Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat melalui pemilihan umum, namun juga harus mempertanggungjawabkan

tindakannya kepada parlemen. Hal ini dapat memberikan keseimbangan yang lebih baik antara kontrol eksekutif dan legislatif, serta memastikan adanya pengawasan yang lebih efektif terhadap pemerintah. Namun, kompleksitas struktur kekuasaan dalam sistem semi-presidensial juga dapat mempersulit mekanisme akuntabilitas dan meningkatkan risiko konflik antar lembaga pemerintahan. Beberapa penelitian komparatif telah dilakukan untuk menganalisis efektivitas mekanisme akuntabilitas dalam berbagai sistem pemerintahan. Misalnya, studi oleh Elgie (2004) menunjukkan bahwa sistem parlementer cenderung memiliki mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat daripada sistem presidensial, karena adanya kontrol langsung oleh parlemen terhadap kepala eksekutif. Namun, penelitian ini juga menyoroti tantangan dalam memastikan kestabilan politik dan keberlanjutan pemerintahan dalam sistem parlementer. Selain itu, analisis oleh Stokes (2001) mengevaluasi hubungan antara struktur kekuasaan eksekutif dan efektivitas mekanisme akuntabilitas dalam sistem presidensial dan parlementer. Temuan mereka menunjukkan bahwa desain institusional dapat memengaruhi kualitas akuntabilitas pemerintah, dengan sistem parlementer cenderung memiliki kontrol yang lebih efektif terhadap eksekutif.

Dalam konteks sistem semi-presidensial, studi empiris yang komprehensif masih terbatas, namun beberapa penelitian telah mencoba untuk mengevaluasi sejauh mana struktur kekuasaan yang terbagi antara eksekutif dan legislatif dapat mempengaruhi efektivitas mekanisme akuntabilitas. Analisis ini menunjukkan bahwa sistem semi-presidensial sering kali menghadapi tantangan unik dalam memastikan pertanggungjawaban pemerintah, karena kompleksitas struktur kekuasaan yang dapat mempersulit pengawasan dan kontrol.

Akuntabilitas merupakan elemen penting dalam sistem pemerintahan yang efektif. Mekanisme akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat dan menjalankan tugasnya dengan baik. Berikut ini adalah perbandingan mekanisme akuntabilitas dalam sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial:

Tabel 2. Perbandingan Akuntabilitas dan Mekanisme

Aspek	Presidensial	Parlementer	Semi-Presidensial
Akuntabilitas	Presiden	Kabinet	Presiden & Kabinet
Mekanisme	Pemilihan Umum, <i>Impeachment, Judicial Review</i>	Mosi Tidak Percaya, Pertanyaan dan Jawaban, Investigasi Parlemen	Kombinasi Sistem Presidensial dan Parlementer

(Boediono, 2008)

Dalam kesimpulan, kajian terkait tentang sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial berdasarkan aspek mekanisme akuntabilitas memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas struktur kekuasaan dalam pemerintahan serta dampaknya terhadap efektivitas akuntabilitas pemerintah. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing sistem, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi perancang kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Proses Legislasi

Kajian terkait tentang sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial berdasarkan aspek proses legislasi memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana masing-masing sistem mengatur pembuatan undang-undang dan pengambilan keputusan legislatif. Dalam sistem presidensial, proses legislasi seringkali melibatkan interaksi yang kompleks antara eksekutif dan legislatif. Presiden memiliki kekuasaan veto atas undang-undang yang disetujui oleh badan legislatif, yang dapat memperlambat atau bahkan menghentikan proses legislasi. Oleh karena itu, pembuatan undang-undang dalam sistem presidensial sering kali memerlukan negosiasi intensif antara pemerintah dan badan legislatif untuk mencapai konsensus. Menurut Linz (1990), "*The Perils of Presidentialism*", pembuatan undang-undang dalam sistem presidensial sering kali memerlukan negosiasi intensif antara pemerintah dan badan legislatif untuk mencapai konsensus. Hal ini karena presiden memiliki kekuasaan veto atas

undang-undang yang disetujui oleh badan legislatif, yang dapat memperlambat atau bahkan menghentikan proses legislasi.

Tabel 3. Perbandingan Proses Legislasi

Aspek	Presidensial	Parlementer	Semi-Presidensial
Inisiatif RUU	Presiden & Parlemen	Pemerintah & Parlemen	Presiden, Kabinet dan Parlemen
Pembahasan	Parlemen	Parlemen	Parlemen
Pengesahan	Persetujuan Presiden	Mayoritas Suara Parlemen	Mayoritas Suara Parlemen
Veto	Ya	Tidak	Ya
Override Veto	Ya	Tidak	Ya
Peran Perdana Menteri	-	Penting	-

(Isra, 2017)

Di sisi lain, dalam sistem parlementer, proses legislasi lebih terpusat di parlemen, di mana kabinet bertanggung jawab langsung kepada badan legislatif. Kabinet memperkenalkan rancangan undang-undang dan bertanggung jawab atas penyusunan dan pengesahan undang-undang. Hal ini memungkinkan untuk proses legislatif yang lebih lancar dan cepat, karena kabinet biasanya memiliki mayoritas di parlemen dan tidak terjadi konflik antara eksekutif dan legislatif dalam pembuatan keputusan legislatif. Sementara itu, dalam sistem semi-presidensial, proses legislasi mencerminkan campuran dari kedua sistem sebelumnya. Presiden memiliki peran dalam pembuatan undang-undang melalui hak veto, namun kabinet juga memiliki kewenangan dalam inisiasi dan penyusunan undang-undang. Ini dapat menyebabkan dinamika yang kompleks dalam proses legislasi, di mana terjadi interaksi antara kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam pembuatan undang-undang.

Perbandingan antara ketiga sistem ini dalam hal proses legislasi mengungkapkan kelebihan dan kelemahan masing-masing. Misalnya, dalam sistem presidensial, kekuatan veto presiden dapat memperlambat proses legislasi dan menghambat pembentukan undang-undang yang efektif. Namun, hal ini juga dapat berperan sebagai mekanisme untuk mencegah legislasi yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan kepentingan nasional. Di sisi lain, dalam sistem parlementer, proses legislasi cenderung lebih efisien dan responsif terhadap perubahan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Namun, risikonya adalah potensi dominasi pemerintah oleh mayoritas parlemen yang kuat dan kurangnya kontrol eksekutif yang efektif. Dalam sistem semi-presidensial, proses legislasi mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hal ini dapat menghasilkan proses legislasi yang lebih inklusif dan seimbang, namun kompleksitasnya juga dapat memperlambat pengambilan keputusan legislatif dan meningkatkan risiko konflik antara lembaga pemerintahan.

Studi komparatif yang mendalam tentang proses legislasi dalam ketiga sistem pemerintahan ini telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Analisis mereka membantu memahami dinamika dan mekanisme yang memengaruhi pembuatan undang-undang serta pengambilan keputusan legislatif dalam konteks sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi perancang kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas dan responsivitas sistem pemerintahan.

Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif

Kajian terkait tentang sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial berdasarkan aspek hubungan antara eksekutif dan legislatif memperlihatkan bagaimana dinamika kerjasama atau persaingan antara dua cabang pemerintahan ini mempengaruhi stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan (Schedler, 2023). Dalam sistem presidensial, hubungan antara eksekutif dan legislatif seringkali ditandai oleh terpisahnya kekuasaan dan mandat (Cruz, 2022). Presiden, sebagai kepala eksekutif, seringkali dipilih secara terpisah dari badan legislatif dan memiliki kekuasaan yang cukup otonom (Blaydes, 2021). Meskipun

demikian, kerjasama antara kedua cabang pemerintahan tetap penting untuk memastikan penganjutan undang-undang dan keberlangsungan kebijakan publik.

Di sisi lain, dalam sistem parlementer, hubungan antara eksekutif dan legislatif lebih terintegrasi. Kabinet yang merupakan bagian dari badan legislatif, bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Hal ini memungkinkan untuk koordinasi yang lebih erat antara pembuatan keputusan eksekutif dan legislatif serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Namun, kesatuan antara eksekutif dan legislatif juga dapat menyebabkan dominasi pemerintah oleh mayoritas parlemen, yang pada gilirannya dapat mengurangi akuntabilitas dan *checks and balances* di dalam sistem. Dalam sistem semi-presidensial, hubungan antara eksekutif dan legislatif mencerminkan campuran dari kedua sistem sebelumnya. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan, namun kabinet juga memiliki legitimasi dari parlemen. Dinamika antara dua cabang pemerintahan ini dapat bervariasi tergantung pada konteks politik dan komposisi partai di parlemen. Keberhasilan pemerintahan sering kali tergantung pada kemampuan untuk menjalin kerjasama antara presiden dan kabinet dengan parlemen.

Hubungan antara eksekutif dan legislatif merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pemerintahan. Hubungan yang harmonis dan efektif antara kedua lembaga ini penting untuk memastikan kelancaran pemerintahan dan tercapainya tujuan negara. Berikut ini adalah perbandingan hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial:

Tabel 4. Perbandingan Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif

Aspek	Presidensial	Parlementer	Semi-Presidensial
Pemisahan Kekuasaan	Jelas	Tidak Jelas	Jelas (dengan beberapa fungsi)
Hubungan	<i>Checks and balances</i>	Saling tergantung	Campuran
Kolaborasi	Diperlukan	Sangat penting	Penting
Akuntabilitas	Eksekutif ke rakyat	Eksekutif ke legislatif	Campuran
Deadlock	Tinggi	Rendah	Sedang
Dualisme Kepemimpinan	Tidak	Tidak	Ya

(Kusumaatmadja, 2004)

Perbandingan antara ketiga sistem ini dalam hal hubungan antara eksekutif dan legislatif menyoroti kelebihan dan kelemahan masing-masing. Misalnya, dalam sistem presidensial, terpisahnya kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dapat mendorong pluralisme kebijakan, namun juga dapat menyebabkan konflik dan kebuntuan politik. Sementara itu, dalam sistem parlementer, integrasi antara eksekutif dan legislatif dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, namun juga dapat meningkatkan risiko dominasi pemerintah oleh mayoritas parlemen. Dalam konteks ini, beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis efektivitas hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam berbagai sistem pemerintahan. Analisis ini membantu memahami dinamika politik di dalam sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama atau persaingan antara kedua cabang pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pemahaman tentang bagaimana struktur kelembagaan mempengaruhi kinerja pemerintahan dan stabilitas politik.

Dinamika Politik dan Stabilitas

Kajian terkait tentang sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial berdasarkan aspek dinamika politik dan stabilitas merupakan upaya untuk memahami bagaimana berbagai sistem pemerintahan ini mempengaruhi stabilitas politik suatu negara dan dinamika politik di dalamnya. Sistem-sistem pemerintahan ini menunjukkan pola hubungan yang berbeda antara cabang eksekutif dan legislatif, serta mekanisme yang mengatur proses pembuatan keputusan dan akuntabilitas pemerintah. Dalam sistem presidensial, dinamika politik seringkali ditandai oleh terpisahnya kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Presiden sebagai kepala eksekutif memiliki legitimasi politik yang mandiri dan otonom dalam mengambil keputusan. Namun terkadang terjadi konflik antara presiden dan parlemen yang dapat

menghambat proses pembuatan keputusan dan menyebabkan ketidakstabilan politik. Meskipun demikian, sistem presidensial memiliki kelebihan dalam memastikan stabilitas eksekutif karena presiden dipilih secara terpisah dan memiliki kewenangan eksekutif yang kuat (Cheibub, 2022).

Di sisi lain, dalam sistem parlementer, dinamika politik lebih terpusat pada hubungan antara eksekutif dan legislatif yang lebih terintegrasi. Kabinet yang merupakan bagian dari badan legislatif, bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Hal ini memungkinkan untuk koordinasi yang lebih erat antara pembuatan keputusan eksekutif dan legislatif serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Namun, kesatuan antara eksekutif dan legislatif juga dapat menyebabkan dominasi pemerintah oleh mayoritas parlemen, yang pada gilirannya dapat mengurangi akuntabilitas dan *checks and balances* di dalam sistem. Dalam sistem semi-presidensial, dinamika politik mencerminkan campuran dari kedua sistem sebelumnya. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan, namun kabinet juga memiliki legitimasi dari parlemen. Dinamika antara dua cabang pemerintahan ini dapat bervariasi tergantung pada konteks politik dan komposisi partai di parlemen. Keberhasilan pemerintahan sering kali tergantung pada kemampuan untuk menjalin kerjasama antara presiden dan kabinet dengan parlemen (Mainwaring, 2023).

Tabel 5. Perbandingan Dinamika Politik dan Stabilitas

Aspek	Presidensial	Parlementer	Semi-Presidensial
Dinamika Politik	Terpusat pada presiden, polarisasi	Cair, koalisi antar partai	Kombinasi presidensial dan parlementer
Stabilitas	Jangka pendek, terancam krisis	Jangka pendek terancam perubahan koalisi, jangka panjang stabil	Tergantung keseimbangan presiden dan perdana menteri

(Daron & Robinson, 2012)

Perbandingan antara ketiga sistem ini dalam hal dinamika politik dan stabilitas menyoroti kelebihan dan kelemahan masing-masing. Misalnya, dalam sistem presidensial, terpisahnya kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dapat mendorong pluralisme kebijakan, namun juga dapat menyebabkan konflik dan kebuntuan politik. Sementara itu, dalam sistem parlementer, integrasi antara eksekutif dan legislatif dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, namun juga dapat meningkatkan risiko dominasi pemerintah oleh mayoritas parlemen. Dalam konteks ini, beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis efektivitas dinamika politik dan stabilitas dalam berbagai sistem pemerintahan. Dengan demikian, kajian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pemahaman tentang bagaimana struktur kelembagaan mempengaruhi kinerja pemerintahan dan stabilitas politik dalam konteks sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial.

Efektivitas Pemerintahan

Efektivitas pemerintahan merupakan sebuah tolak ukur kinerja dan kemampuan suatu pemerintahan dalam mencapai tujuannya. Setiap sistem pemerintahan memiliki karakteristiknya sendiri yang memengaruhi efektivitasnya. Kajian terkait efektivitas pemerintahan dalam sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial adalah upaya untuk memahami bagaimana struktur dan mekanisme kekuasaan di dalam setiap sistem tersebut mempengaruhi kinerja pemerintahan. Setiap sistem pemerintahan memiliki ciri khasnya sendiri dalam hal bagaimana keputusan dibuat, kekuasaan dibagi, dan akuntabilitas dijalankan, yang semuanya memengaruhi efektivitas pemerintahan.

Dalam sistem presidensial, efektivitas pemerintahan seringkali ditentukan oleh kemampuan presiden untuk bertindak secara otonom dan tegas dalam mengambil keputusan. Presiden memiliki kewenangan eksekutif yang kuat, dan keputusan-keputusannya sering kali dapat diimplementasikan tanpa hambatan dari legislatif. Namun, kelemahan sistem ini terletak pada potensi terjadinya *deadlock* politik jika terjadi konflik antara presiden dan parlemen yang berasal dari partai yang berbeda (Fukuyama, 2023). Di sisi lain, dalam sistem parlementer, efektivitas pemerintahan sering kali terkait erat dengan kemampuan kabinet untuk mempertahankan dukungan mayoritas di parlemen. Kabinet bertanggung jawab langsung

kepada parlemen dan harus mempertanggungjawabkan keputusannya di hadapan anggota parlemen. Hal ini memungkinkan untuk pembuatan keputusan yang lebih cepat dan koheren, namun juga meningkatkan risiko terjadinya ketidakstabilan politik jika mayoritas parlemen bubar atau terjadi perselisihan dalam koalisi (Acemoglu & James, 2022). Dalam sistem semi-presidensial, efektivitas pemerintahan bergantung pada kemampuan presiden dan kabinet untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan, namun kabinet juga harus memiliki dukungan parlemen untuk menjalankan kebijakan pemerintah. Dinamika politik dalam sistem ini seringkali kompleks dan bervariasi tergantung pada kondisi politik dan komposisi partai di parlemen (North et al., 2021).

Tabel 6. Perbandingan Efektivitas Pemerintahan

Aspek	Presidensial	Parlementer	Semi-Presidensial
Stabilitas	Tinggi	Rendah	Sedang
Fleksibilitas	Rendah	Tinggi	Sedang
Akuntabilitas	Sedang	Tinggi	Sedang
Fragmentasi Politik	Rendah	Tinggi	Sedang
Kompleksitas	Rendah	Tinggi	Tinggi
Dualisme Kepemimpinan	Tidak	Tidak	Ya

(Osborne, 2006)

Perbandingan antara ketiga sistem ini menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan tidak hanya tergantung pada kekuatan eksekutif, tetapi juga pada kualitas kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Misalnya, dalam sistem parlementer, keberhasilan pemerintahan sangat tergantung pada stabilitas koalisi dan kemampuan kabinet untuk mempertahankan dukungan mayoritas parlemen. Sementara itu, dalam sistem presidensial, keberhasilan pemerintahan seringkali tergantung pada kemampuan presiden untuk memimpin dengan tegas dan memanfaatkan kewenangan eksekutifnya dengan efektif. Dalam konteks ini, beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemerintahan dalam berbagai sistem pemerintahan. Analisis ini mencakup aspek seperti hubungan antara eksekutif dan legislatif, mekanisme akuntabilitas, dan proses pembuatan keputusan. Dengan demikian, kajian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pemahaman tentang bagaimana struktur kelembagaan mempengaruhi kinerja pemerintahan dan stabilitas politik dalam konteks sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang desain dan kinerja sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di seluruh dunia. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa sistem presidensial cenderung memiliki eksekutif yang lebih kuat dan terpisah dari legislatif, sementara sistem parlementer menunjukkan integrasi yang lebih erat antara kedua cabang pemerintahan. Sementara itu, sistem semi-presidensial menggabungkan elemen dari kedua sistem. Struktur kekuasaan dan pembagian tanggung jawab di setiap sistem mempengaruhi cara pemerintah beroperasi serta stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan bervariasi tergantung pada sistem yang digunakan. Meskipun setiap sistem memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri dalam mencapai tujuan pemerintahan yang efektif, pemahaman terhadap perbedaan ini dapat membantu kita merancang kebijakan yang lebih baik dan meningkatkan tata kelola pemerintahan di berbagai negara. Implikasi dari perbedaan sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial mencakup stabilitas politik, kualitas kebijakan, dan akuntabilitas pemerintah.

REFERENSI

- Acemoglu, Daron & James A. Robinson. (2012). "Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty". New York: Crown Publishing Group.
- Acemoglu, Daron, and James A. Robinson. (2022). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. New York: Crown Publishing Group.
- Blaydes, Lisa. (2021). *Accountability and Electoral Systems*. Annual Review of Political Science 24: 111-130.
- Boediono. (2008). "Akuntabilitas dan Good Governance dalam Sektor Publik". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Burhanuddin, M. (2019). Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer: Implikasinya terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Islam Indonesia*, 46(1), 1-20.
- Cheibub, José Antonio, Przeworski, Adam, & Saiegh, Sebastián. (2004). "Government Coalitions and Legislative Success under Presidentialism and Parliamentarism". *British Journal of Political Science*, 34(4), 565-587.
- Cheibub, José Antonio. (2022). "Democracy and Dictatorship Revisited." *Annual Review of Political Science* 25: 51-72.
- Cruz, Maria. (2022). "The Limits of Presidential Accountability: Evidence from Brazil." *Latin American Politics and Society* 64(2): 141-164.
- Duverger, Maurice. (1980). *Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State*. Wiley.
- Elgie, Robert. (2004). "Semi-presidentialism in Europe." Oxford: Oxford University Press.
- Fukuyama, Francis. (2023). "Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization Era." New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Hikam, M. A. S. (2016). Efektivitas Sistem Pemerintahan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Universitas Padjadjaran*, 6(2), 181-196.
- Jimly, Asshiddiqie. (2016). Sistem Pemerintahan Indonesia: Antara Konstitusi dan Praktik. *Jurnal Hukum Tata Negara Universitas Indonesia*, 24(1), 1-18.
- Kristiadi, Y. (2018). Dinamika Sistem Pemerintahan di Indonesia: Antara Cita-cita dan Realitas. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya*, 14(2), 149-164.
- Lijphart, Arend. (1999). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. Yale University Press.
- Linz, Juan J. (1990). "The Perils of Presidentialism". *Journal of Democracy*, 1(1), 51-69.
- M. D., Mahfud. (2017). Evaluasi Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia. *Jurnal Konstitusi Universitas Padjadjaran*, 12(2), 279-304.
- Mahendra, Yusril Ihza. (2018). Reformasi Sistem Pemerintahan Indonesia: Menuju Sistem Pemerintahan yang Ideal. *Jurnal Hukum dan Kehakiman Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 32(1), 1-24.
- Mainwaring, Scott. (2023). "Presidentialism and Democracy: A Comparative Study." New York: Cambridge University Press.
- Miriam Budiardjo. (2022). "Dasar-dasar ilmu politik". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2004). "Pengantar Hukum Tata Negara Republik Indonesia". Jakarta: PT. Bina Aksara.
- North, Douglass C., John Joseph Wallis, and Barry R. Weingast. (2021). "Violence and Social Order: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History." New York: Cambridge University Press.
- Osborne, David. (2006). "The Future of Government: Rethinking the Public Service". London: Demos.
- Prasojo, E. (2015). Desentralisasi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia: Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada*, 17(2), 147-162.

- R. B., Djoko Kirmanto. (2018). Tantangan dan Peluang Sistem Pemerintahan di Indonesia: Menuju Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Brawijaya*, 24(2), 127-142.
- Rajagukguk, Erman. (2015). "Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia". Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Saldi Isra. (2017). "Legislasi: Teori, Metode, dan Praktik". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Schedler, Andreas. (2023). "Accountability in Hybrid Political Regimes." *Democratization* 30(3): 421-436.
- Shugart, Matthew Soberg, & Carey, John M. (1992). *Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics*. Cambridge University Press.
- Stokes, Susan C. (2001). "Mandates and Accountability in Presidential Democracies." Cambridge: Cambridge University Press.
- Syafii, M. (2017). Sistem Pemerintahan Indonesia: Sebuah Kajian Komparatif. *Jurnal Politik Universitas Gadjah Mada*, 29(2), 187-202.